



BERGERAK NEWS

BULETIN

MINGGU KE-2 FEBRUARI 2025



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- PELAYANAN HUKUM



HIGHLIGHT

BERGERAK NEWS



04 **WUJUDKAN AKSES KEADILAN, KEMENKUM KALSEL DAN DPRD HST BAHAS RANPERDA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

16 **SIMPLIFIKASI DAN DIGITALISASI HARMONISASI RAPERDA/RAPERKADA, KANWIL KEMENKUM KALSEL IKUTI RAPAT KOORDINASI APLIKASI E-HARMONISASI**

17 **SOSIALISASI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2025: KEMENKUM KALSEL DORONG DESA DAN KELURAHAN JADI GARDA TERDEPAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM**

19 **KADIV P3H PIMPIN RAPAT, UPAYAKAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM**



KANWIL KEMENKUM KALSEL BERSAMA PEMKAB TAPIN SINERGI HARMONISASIKAN 2 RAPERDA, WUJUDKAN PRODUK HUKUM BERKUALITAS



PERLUAS KERJA SAMA LAYANAN KI, KEMENKUM KALSEL SASAR PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KALIMANTAN MELALUI LLDIKTI WILAYAH XI

20 **SINERGI KEMENKUM KALSEL DAN UIN ANTASARI BANJARMASIN DALAM OPTIMALISASI LAYANAN KI: LANGKAH KONGKRET WUJUDKAN KI GOES TO CAMPUS**

22 **PERSIAPAN PENGUKUHAN DWP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM, KANWIL KEMENKUM KALSEL IKUTI RAPAT KOORDINASI**



kemenkumkalsel



kumham_kalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Apel Pagi Kanwil Kemenkum Kalsel, Komitmen Jaga Kualitas Pelayanan dan Marwah Kementerian



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar Apel Pagi, Senin (10/02). Bertindak sebagai Pembina Apel Pagi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan sebagai Pemimpin Apel Pagi, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Eka Sari. Hadir dalam Apel Pagi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti; Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana; Pejabat Manajerial, Pejabat Non Manajerial, PPNPN dan Siswa/siswi magang. Dalam Amanat yang disampaikan ditekankan pentingnya efisiensi anggaran, disiplin dalam bekerja pada kondisi Work From Home, serta menjaga nama baik institusi.

Meidy Firmansyah sampaikan bahwa dalam situasi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, seluruh jajaran diingatkan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meskipun kita menghadapi kondisi efisiensi anggaran, kita harus bertanggung jawab untuk tetap memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Selain itu, terkait kebijakan Work From Home (WFH) yang telah diterapkan, seluruh pegawai diingatkan bahwa WFH bukanlah libur, melainkan bentuk fleksibilitas kerja yang tetap mengharuskan pegawai siaga dalam menjalankan tugasnya.

“Saya ingatkan bahwa WFH bukan berarti libur. Setiap pegawai tetap harus standby dan melaksanakan tugas serta pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Di akhir amanatnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan bahwa setiap individu di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel membawa nama institusi Kementerian Hukum. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga nama baik dan marwah institusi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

“Masing-masing dari kita membawa nama Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kita harus menjaga nama baik dan marwah Kementerian di manapun kita berada,” pungkas Meidy. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



Wujudkan Akses Keadilan, Kemenkum Kalsel dan DPRD HST Bahas Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Rapat Harmonisasi guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (10/2/25) di Balai Pertemuan Garuda (BPG) Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, beserta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Hendra Suriadi, unsur pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretariat Dewan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta Bagian Hukum Kabupaten HST.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk memastikan pembentukan produk hukum yang berkualitas. Ia menekankan bahwa peraturan yang dibuat harus selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan yang berada di bawahnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam implementasinya.

Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, H. Hendra Suriadi, menyampaikan Ranperda ini dalam rangka mewujudkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menyebutkan bahwa dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sehingga hak konstitusional mereka dalam memperoleh keadilan benar-benar terlindungi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, mengapresiasi inisiatif DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyusun Ranperda ini. Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Harmonisasi peraturan ini juga mencerminkan semangat untuk menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya penyesuaian regulasi ini, diharapkan setiap kebijakan hukum yang diterbitkan di daerah dapat sejalan dengan visi pembangunan nasional. (Humas Kanwil Kemenkum, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko)



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Asistensi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan Fraud Control Plan

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Asistensi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Fraud Control Plan secara virtual, di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Senin (10/02). Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko di tahun 2025. Hadir dalam kegiatan, JFT Analisis Anggaran Ahli Muda, Ahmad Zubaidi beserta jajaran terkait.

Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja, Bramantyo Agung Nugroho, dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa asistensi ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum.

“Kegiatan ini merupakan asistensi yang diberikan dalam rangka penguatan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ungkap Bramantyo.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan maturitas SPIP, mengingat komponen ini menjadi bagian krusial dalam sistem pengendalian internal.

“Dalam penyelenggaraan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko menjadi salah satu komponen penting yang harus dikelola dengan baik,” tambahnya.

Bramantyo juga menyampaikan harapannya agar dengan semakin sedikitnya jumlah satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyusunan serta pelaksanaan Manajemen Risiko dapat lebih maksimal dan optimal.

Sementara itu, Diah, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan maksimal dalam proses ini.

“Kami akan mencoba membantu semaksimal mungkin atas apa yang telah dirintis, sehingga pondasi yang dibangun menjadi kuat dan sesuai dengan pedoman serta arahan yang ada,” ujar Diah.

Diah juga menyoroti perlunya pembaruan pedoman Manajemen Risiko seiring dengan adanya perubahan struktur organisasi, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan lebih baik.

Kegiatan berlangsung selama 4 (empat) hari dimulai pada senin 10 Februari 2025 s.d Kamis 13 Februari 2025. Dengan adanya asistensi ini, diharapkan Kanwil Kemenkum Kalsel dapat lebih siap dalam mengelola risiko dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



Kakanwil Kemenkum Kalsel Pimpin Pemantauan dan Pengamanan Aset Gedung Baru



Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan (Kalsel), Nuryanti Widyastuti beserta jajaran melakukan pemantauan dan pengamanan aset gedung baru Kanwil Kemenkum Kalsel di Banjarbaru, pada Senin (10/02/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelayakan gedung baru yang telah selesai pembangunan tahap 1 tersebut. Kakanwil Kemenkumham Kalsel tiba langsung memimpin peninjauan ke setiap ruangan gedung. Hasilnya, kondisi fisik bangunan gedung baru dinyatakan baik. Namun, berdasarkan peninjauan tersebut, ditemukan bahwa gedung baru tersebut belum memiliki akses pintu keluar dan masuk.



Untuk itu, Kakanwil Kemenkum Kalsel menginstruksikan pembuatan akses pintu keluar dan masuk gedung, sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara. Sambil menunggu pembangunan tahap kedua, akses ini dinilai penting untuk menunjang keamanan gedung.

Pemantauan ini juga diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian TU dan Umum, Kontraktor Pelaksana Fisik Pembangunan Gedung Kemenkum Kalsel Tahun Anggaran 2024, dan Staf Bagian TU dan Umum. (Humas Kemenkum Kalsel, ed: Eko/Arie)



Sinergi Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Tanah Laut, Bersama Bahas Draft MoU untuk Tingkatkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk membahas Kesepakatan Bersama terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum pada hari Senin (10/02) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Riswandi. Sementara dari Pemkab Tanah Laut, dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, M. Sahriyanur.

Dalam pertemuan tersebut, M. Sahriyanur menyampaikan bahwa Kesepakatan Bersama ini merupakan untuk membenahi dasar dan nomenklatur hukum yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunannya.

PKS yang ada nantinya akan disempurnakan guna mendukung sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam aspek pembentukan regulasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Anton Edward Wardhana menyambut baik draft Kesepakatan Bersama ini, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kadiv P3H menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel mendukung penuh Kesepakatan ini.

”Kami siap melanjutkan dan menyempurnakan sinergi yang telah ada serta memberika pelayanan terkait Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analis Kebijakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Kabupaten Tanah Laut”, sebut Anton Edward Wardhana.

Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, diharapkan nantinya kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Tanah Laut dapat semakin erat dalam meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Tanah Laut. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)



Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Kakanwil DJPb: Perkuat Sinergi dalam Pengelolaan Anggaran



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menerima kunjungan koordinasi dan silaturahmi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, beserta jajaran pada Selasa, 11 November 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalsel turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta Kepala Bagian Tata Usaha & Umum, Rustam Sakka. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi terkait berbagai isu strategis, termasuk perubahan nomenklatur kelembagaan, efisiensi anggaran, serta optimalisasi pelaksanaan tugas khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu topik utama dalam diskusi adalah perubahan nomenklatur di lingkungan Kemenkum, yang kini telah memiliki struktur masing-masing, termasuk Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Pemasarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil HAM. Perubahan ini berdampak pada pengelolaan anggaran serta struktur kelembagaan yang sedang dalam proses penyesuaian.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas efisiensi anggaran, termasuk kendala dalam pembangunan Kanwil baru di Banjarbaru yang saat ini harus tertunda. Kakanwil dan jajaran turut berdiskusi mengenai revisi DIPA di setiap unit kerja guna memastikan anggaran tetap berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan program kerja secara optimal.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menegaskan bahwa kunjungan ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. “Sinergi yang baik dengan DJPb sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan dengan lancar,” ujar Nuryanti. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto: Joel, ed: Eko)





Kanwil Kemenkum Kalsel Bersama Pemkab Tapin Sinergi Harmonisasikan 2 Raperda, Wujudkan Produk Hukum Berkualitas

Banjarmasin, Humas_Info - Kanwil Kemenkum Kalsel lakukan rapat harmonisasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tapin, Selasa (11/02) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Rapat Harmonisasi ini merupakan tindak lanjut Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin Nomor:100.3.2/010/BAGKUM/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Pengharmonisasian Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Nomor: 100.3.2/011/BAGKUM/ 2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Pengharmonisasian Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Memimpin jalannya rapat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyambut baik atas kedatangan jajaran dari Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka proses harmonisasi Raperda dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam rangka meraih predikat WBK.

Zainal Aqli selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sampaikan apresiasinya atas sinergi dalam proses harmonisasi Raperda. "Terima kasih karena telah diterima dengan baik dalam proses harmonisasi Raperda. Dengan perbaikan perda ini, kedepannya akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kendala dan permasalahan yang dihadapi. Semoga dalam pembahasan ini, hasilnya dapat memberikan dampak terbaik bagi masyarakat," paparnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tapin, Achmad Ramadhan dalam kesempatannya berikan penjelasan terkait Raperda yang akan dilakukan harmonisasi. Achmad juga mengungkapkan kedepannya mohon kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kalsel karena akan ada beberapa Raperda lain yang diajukan untuk proses serupa.

Dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal dan tanggapan yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Turut hadir dalam kegiatan, JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, JFT Analis Hukum, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapin, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, RSUD Datu Sanggul, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).



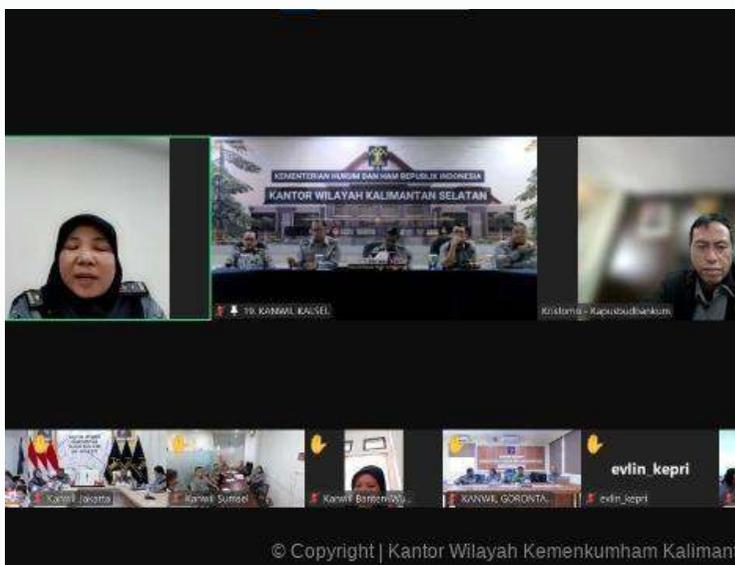
Jelang Seleksi Paralegal Justice Award 2025, Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Virtual Bersama BPHN



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam rapat persiapan pelaksanaan seleksi Paralegal Justice Award Tahun 2025. Kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara daring ini melibatkan seluruh Kantor Wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan yang akan mendukung suksesnya pelaksanaan Paralegal Justice Award tahun 2025.

Pada rapat ini, kegiatan Paralegal Justice Award 2025 akan dimulai dengan berbagai langkah persiapan yang meliputi pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Pembentukan Pos Bantuan Hukum, serta pelaksanaan kegiatan Paralegal Academy dan Diklat Paralegal Serentak. Puncaknya, acara ini akan ditutup dengan pelaksanaan Paralegal Justice Award yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat, serta mendukung kemajuan daerah mereka.

Dalam rapat virtual yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, serta Tim Kerja Sosialisasi dan Seleksi Paralegal Justice Award 2025 di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, dibahas mengenai seleksi peserta Paralegal Academy sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.



“Seleksi peserta Paralegal Academy akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kepala BPHN. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa para peserta yang terlibat memiliki pemahaman yang baik terkait hukum serta mampu berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat,” ujar Yulli Rachmadani, Analis Hukum Ahli Muda di Kanwil Kemenkum Kalsel yang juga selaku Ketua Tim Kerja.

Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkum RI, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat kompetensi masyarakat, khususnya Kepala Desa atau Lurah, dalam menangani masalah hukum.

Anton Edward Wardhana, selaku Kepala Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel, mengungkapkan komitmennya untuk terus mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. “Kami akan terus berupaya mendorong peningkatan jumlah Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan memastikan partisipasi aktif dalam Paralegal Academy. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini dan memperbesar peluang Kalimantan Selatan untuk meraih penghargaan dalam ajang Paralegal Justice Award 2025,” pungkasnya. (Humas Kanwil Kemenkum Kalsel, Teks dan Foto: Joel, Ed: Eko).



Kolaborasi Luncurkan Sentra Layanan KI Pertama di Tapin: Kanwil Kemenkum Kalsel Bersama Bappedalitbang Kab Tapin Mantapkan Persiapan



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Tapin berkolaborasi untuk meluncurkan Sentra Layanan Kekayaan Intelektual (KI) pertama di Kabupaten Tapin. Pada pertemuan pada Selasa (11/02) Kanwil Kemenkum Kalsel yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi dan Pelaksana pada Bidang KI ini membahas sejumlah isu strategis terkait pendaftaran merk, Indikasi Geografis (IG), dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), termasuk penamaan produk pupuk, IG Kopi Hatuhun, hingga perlindungan tarian tradisional Tapin.

Salah satu poin utama yang mengemuka adalah dilema kewenangan pendaftaran merk produk pupuk. Meski Peraturan Daerah (Perda) Tapin menetapkan Dinas Perindustrian sebagai pihak berwenang, namun belum satu persepsi karena berpandangan bahwa produk pupuk tidak termasuk kategori makanan. Dalam diskusi tersebut, Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, menegaskan bahwa pendaftaran merk produk yang didanai Pemda sebenarnya bisa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi daerah.

“Manfaat seperti royalti atau bagi hasil dapat diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), tergantung kesepakatan dengan Pemda,” jelasnya.

Bappedalitbang Tapin juga mengajukan konsultasi terkait percepatan pendaftaran IG Kopi Hatuhun, termasuk pembentukan Tim Percepatan IG Kopi Hatuhun. Selain itu, dibahas pula mekanisme permohonan KI untuk karya cipta lagu daerah, proses pembuatan pupuk organik, dan KIK Tarian Tapin.

“Kami berkomitmen mendukung Pemda Tapin dalam melindungi aset intelektual ini, termasuk pendampingan teknis untuk UMKM yang produknya dibiayai APBD,” ujar Riswandi bersama Tim Layanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kunjungan ini ditutup dengan kesepakatan penyusunan roadmap pendaftaran merk dan KI berbasis potensi lokal Tapin, yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual di daerah tersebut. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Kontributor Bidang KI, ed : Eko/Mahdian)

Kemenkum Kalsel Berpartisipasi dalam Webinar OKE KI: Strategi Pengawasan Indikasi Geografis



Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam Webinar Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pada Senin (11/02/2025).

Kegiatan bertema “Pentingnya Pengawasan Indikasi Geografis (IG)” ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang mekanisme perlindungan produk lokal berbasis kearifan geografis. Melalui webinar virtual, peserta seperti pelaku usaha, pemerintah daerah, dan akademisi mendalami konsep IG sebagai tanda yang menghubungkan produk dengan reputasi, kualitas, dan karakteristik unik dari wilayah asalnya, seperti Kopi Kintamani atau Tenun Kalimantan.

Dalam paparan materi, Idris selaku Kepala Tim Kerja Penjaminan Mutu IG DJKI menjelaskan dasar hukum IG berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, yang melindungi produk berbasis sumber daya alam, kerajinan tangan, dan hasil industri khas daerah. Ditekankan pula bahwa pemilik IG dapat berupa kelompok produsen seperti petani, pengrajin, pengepul, atau pedagang yang terlibat langsung dalam rantai produksi. Perlindungan IG berlaku tanpa batas waktu selama kualitas dan reputasi produk terjaga, sehingga pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Narasumber juga mengulas kendala klasik produsen IG, seperti akses pasar terbatas, masalah distribusi, dan remunerasi harga yang tidak seimbang, serta pentingnya penggunaan logo IG sebagai penanda autentisitas dan nilai tambah produk.

Kegiatan ditutup dengan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan sinergi dengan DJKI dan pemerintah daerah dalam sosialisasi, pendampingan teknis, dan pengawasan IG. Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait strategi mengatasi kendala distribusi, pemanfaatan logo IG, serta mekanisme pengaduan pelanggaran. Melalui webinar ini, diharapkan produk-produk khas Kalimantan yang memiliki potensi IG, seperti hasil hutan non-kayu dan kerajinan tradisional, dapat terlindungi secara hukum, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. (Kontributor Bidang KI, ed: Eko/Arie)



Rapat Kerja Teknis Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025: Optimalisasi Kinerja dengan Teknologi Informasi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, (12/02/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dihadiri oleh jajaran pejabat terkait.

Dalam rapat kerja teknis ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel beserta jajaran berpartisipasi aktif dalam diskusi bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, serta para pejabat fungsional peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pemaparan dari BPHN mengenai tugas dan fungsi pembinaan hukum di kantor wilayah serta pedoman pelaksanaan pembinaan hukum di daerah. Selain itu, Kepala BPHN juga memberikan arahan terkait evaluasi laporan kinerja pembinaan hukum yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Pada kesempatan ini, BPHN menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan pembinaan hukum di tahun 2025. Diharapkan kantor wilayah dapat menyesuaikan kinerjanya dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Kakanwil Kemenkum Kalsel secara terpisah menyampaikan bahwa pembinaan hukum di Kalimantan Selatan akan terus dimaksimalkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025 tidak akan menghambat upaya pembinaan hukum di masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Pembinaan Hukum ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan adanya sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan BPHN, diharapkan upaya pembinaan hukum di wilayah dapat terus ditingkatkan guna menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan taat aturan. (Humas Kemenkum Kalsel, Dicky, Ed : Eko)





Kemenkum Kassel Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati HST: Bahas Biaya Kerumahtanggaan

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Rabu (12/02/2025). Rapat yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham ini membahas Rancangan Peraturan Bupati HST tentang Biaya Kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati HST.

Harmonisasi dibuka oleh Bahjatul Mardiah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya. Ia menjelaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan forum diskusi mengenai rancangan peraturan sebelum diundangkan, untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kassel, Anton Edward Wardhana, dalam sambutan pembukanya menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten HST dalam penyusunan rancangan peraturan bupati tersebut.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab HST, Riswandi, mengakui bahwa rancangan peraturan yang telah dibuat masih memerlukan masukan dari Kanwil Kemenkum Kassel agar menghasilkan peraturan bupati yang berkualitas.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Biaya Kerumahtanggaan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Rancangan peraturan ini mengatur pengalokasian biaya rumah tangga bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam belanja langsung Sekretariat Daerah. Namun, biaya tersebut tidak diberikan jika keduanya sedang cuti di luar tanggungan negara.

Jajaran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Kassel secara aktif memberikan masukan mengenai rancangan peraturan bupati yang diusulkan, dengan tujuan agar peraturan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (Humas Kemenkum Kassel: Arie, ed: Eko)



Kemenkum Kalsel Komitmen Mantapkan Layanan Kekayaan Intelektual di Tengah Masa Efisiensi Anggaran



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berpartisipasi dalam rapat virtual koordinasi efisiensi anggaran tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, (12/02/2025).

Rapat ini diikuti langsung oleh Riswandi selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta jajaran staf Pelayanan Kekayaan Intelektual. Kehadiran berbagai pihak dari seluruh Kantor Wilayah dalam rapat ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai efisiensi anggaran yang optimal. Dalam diskusi yang berlangsung, DJKI menekankan pentingnya menyeimbangkan penghematan anggaran dengan tetap menjaga kualitas layanan dan kinerja pegawai.

Efisiensi anggaran tidak hanya sekadar pengurangan biaya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik. Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyesuaian tambahan pagu yang tidak terblokir, yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kinerja pegawai di wilayah. Hal ini penting agar pegawai dapat terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya kekhawatiran terkait pemotongan anggaran yang berpotensi mengganggu operasional.

Pada pembahasan ini juga menegaskan bahwa dalam proses efisiensi tidak boleh ada pemecatan pegawai PPNPN, sehingga stabilitas tenaga kerja tetap terjaga. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa semua pegawai dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas mereka. Rapat ini juga menyepakati adanya tambahan anggaran sebesar Rp. 250 juta, dengan ketentuan bahwa dana tersebut tidak akan mengurangi atau mengakibatkan pemecatan tim Helpdesk. Dengan tambahan ini, total anggaran yang tersedia kini mencapai Rp. 500 juta, yang diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan.

Pembahasan dalam rapat juga mencakup pengembalian ADK RKAKL, yang dipastikan akan dilakukan, namun masih menunggu waktu yang tepat untuk dieksekusi. Terkait dengan Kelompok Kegiatan (KRO), pimpinan rapat menegaskan bahwa target KRO tidak akan diturunkan dalam waktu dekat. Penyesuaian volume KRO akan dilakukan pada momen yang lebih tepat agar tetap sejalan dengan kebijakan anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga standar kinerja yang tinggi meskipun dalam situasi penghematan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (Kontributor KI, ed: Eko/Arie)



Simplifikasi dan Digitalisasi Harmonisasi Raperda/Raperkada, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Koordinasi Aplikasi E-Harmonisasi



Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, beserta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT Analis Hukum, mengikuti secara virtual kegiatan Rapat Koordinasi Aplikasi E-Harmonisasi Raperda/Raperkada Kanwil Kemenkum bertempat di Balai Pertemuan Berakhlak, Kamis (13/02).

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Dhahana Putra menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi JFT Perancang PUU.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensi JFT Perancang PUU, termasuk profesionalisme, attitude, dan kedisiplinan dalam bekerja," ujar Dhahana. Ia juga mengingatkan agar tim perancang memiliki sense of belonging terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Lebih lanjut, Dhahana menyampaikan bahwa seluruh pelayanan Ditjen PP saat ini telah berbasis elektronik, sehingga proses harmonisasi Raperda akan lebih mudah dengan hadirnya aplikasi E-Harmonisasi.

"Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses harmonisasi Raperda dan Raperkada, karena memungkinkan pemantauan secara langsung mulai dari pengajuan hingga selesainya harmonisasi. Seluruh jajaran diharapkan memberikan performa optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada pemerintah daerah dengan hadirnya aplikasi E-harmonisasi," paparnya.

Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi, Alexander Palti, menambahkan bahwa aplikasi E-Harmonisasi akan diluncurkan pada 25 Februari 2025.

"Melalui aplikasi ini, proses harmonisasi akan menjadi lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, dokumen pengajuan akan tersimpan rapi dalam sebuah database, sehingga menjadi lebih akurat dan akuntabel," jelas Alexander. agar aplikasi ini dapat berjalan sesuai kebutuhan lapangan saat diluncurkan," ungkap Widyastuti.

Nuryanti Widyastuti mengharapkan Melalui aplikasi E-Harmonisasi yang tersedia nantinya akan mensimplifikasi dan mendigitalisasi proses harmonisasi dan mempermudah harmonisasi di Kalimantan Selatan.

"Kami mendukung digitalisasi dan proses pengajuan dan pelaksanaan harmonisasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Harapannya seluruh pelaksana dapat segera menyesuaikan diri dengan demikian pelaksanaan dan proses harmonisasi peraturan daerah akan semakin efektif dan efisien, termasuk di Kalimantan Selatan," ungkapnya. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko)



Sosialisasi Paralegal Justice Award 2025: Kemenkum Kalsel Dorong Desa dan Kelurahan Jadi Garda Terdepan Penyelesaian Sengketa Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Pelaksanaan Kegiatan Paralegal Justice Award (PJA), Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum), serta Diklat Paralegal bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum. Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti oleh para Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten se-Kalsel serta Camat, Kepala Desa dan Lurah binaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai persiapan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Pelatihan Paralegal bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum, serta Sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025. Dalam kesempatan ini, hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, serta Tim Kerja Sosialisasi dan Seleksi PJA 2025 dari Kanwil Kemenkum Kalsel.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah Penyuluh Hukum Ahli Muda Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Edi, dan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, Yulia Qamaryanti.

Dalam kegiatan ini, disampaikan berbagai langkah strategis dalam persiapan Paralegal Justice Award, termasuk pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa/kelurahan, serta pelaksanaan Paralegal Academy dan Diklat Paralegal Serentak. Puncaknya, acara ini akan ditutup dengan penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2025, yang memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil berkontribusi dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat serta mendukung kemajuan daerahnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa hukum.

“Diharapkan Desa/Kelurahan dapat menjadi filter penjaga untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk ke lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan. Dengan demikian, kasus yang masuk ke lembaga tersebut adalah perkara yang benar-benar tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” jelas Anton.

Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dipaparkan pedoman teknis terkait pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, mekanisme pendaftaran Paralegal Academy, hingga kriteria penilaian dalam menentukan pemenang Paralegal Justice Award 2025. Melalui program ini, diharapkan semakin banyak desa dan kelurahan yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri dan berkeadilan. (Humas Kemenkum Kalsel, foto dan teks: Joel, ed: Eko)



Jajaran Kemenkum Kalsel Ikuti Asistensi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan Fraud Control Plan pada Kementerian Hukum

Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP) serta memperkuat Manajemen Risiko di tahun 2025, Kementerian Hukum bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Fraud Control Plan. Kegiatan ini berlangsung secara virtual selama empat hari, mulai dari tanggal 10 hingga 13 Februari 2025, dengan melibatkan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Kamis, (13/02/2025).

Asistensi ini diselenggarakan oleh Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dengan pendampingan dari BPKP. Acara ini dihadiri oleh jajaran Unit Eselon I, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) tim kerja Program dan Pelaporan.

Kegiatan asistensi ini mencakup berbagai sesi yang mendalam mengenai Manajemen Risiko dan Fraud Control Plan, dengan agenda sebagai berikut: (1) Senin, 10 Februari 2025: Asistensi Manajemen Risiko yang membahas prinsip, kebijakan, dan proses Manajemen Risiko. (2) Selasa, 11 Februari 2025: Identifikasi Proses Bisnis Utama dan praktik penyusunan Register Risiko. (3) Rabu, 12 Februari 2025: Asistensi Kebijakan Fraud Control Plan serta pendampingan penyusunan Register Risiko (RMIS), yang dikhususkan untuk Unit Sekretariat Jenderal. (4) Kamis, 13 Februari 2025: Pendampingan penyusunan Register Risiko (RMIS) dengan sampel dari beberapa Unit Kerja.

Melalui kegiatan ini, berbagai aspek dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum telah dibahas dan diidentifikasi. Beberapa poin penting hasil asistensi ini meliputi manajemen Risiko harus diterapkan sejak tahap perencanaan program, dengan identifikasi dini terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi. Analisis risiko perlu dilakukan oleh pemangku tugas dan fungsi agar hasilnya lebih akurat dan implementasinya memberikan dampak positif bagi organisasi. Hingga saat ini, identifikasi risiko belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum masih dalam tahap finalisasi. Oleh karena itu, analisis risiko sementara ini masih berbasis pada Perjanjian Kinerja (PK).

Dengan adanya asistensi ini, diharapkan Kementerian Hukum dapat lebih siap dalam mengelola risiko dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal di setiap unit kerja. Ke depan, kebijakan yang disusun akan menjadi landasan kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi fraud. (Humas Kemenkum Kalsel, Dicky, Ed : Eko)



Kadiv P3H Pimpin Rapat, Upayakan Peningkatan Kualitas Produk Hukum



Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, memimpin rapat bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel pada Kamis (13/02). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dengan fokus utama pada peningkatan kualitas produk hukum yang diharmonisasikan oleh Kemenkum Kalsel.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi guna memperkuat layanan harmonisasi peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu melibatkan peran para Analis Hukum dalam melakukan analisi pada Perda yang sedang diharmonisasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.



Kadiv P3H menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk hukum merupakan bagian dari komitmen Kemenkum Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan selaras dengan aturan yang tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan Analis Hukum dalam menjadi langkah penting yang harus terus diperkuat," ujar Anton Edward Wardhana.

Dengan adanya evaluasi dan peningkatan mekanisme harmonisasi ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, efektif, serta mendukung pembangunan hukum yang lebih baik di Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)



Sinergi Kemenkum Kalsel dan UIN Antasari Banjarmasin dalam Optimalisasi Layanan KI: Langkah Konkret Wujudkan KI Goes to Campus



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melakukan audiensi dalam rangka kerjasama peningkatan bidang kekayaan intelektual di UIN Antasari Banjarmasin pada Kamis (13/2/2025). Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti yang didampingi Kadiv Yankum, Meidy Firmansyah Kabid Pelayanan KI, Riswandi dan jajaran, disambut hangat oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.

Rektor menyampaikan terima kasih atas upaya Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjalin silaturahmi dan kerjasama antar lembaga. Ia juga menekankan pentingnya kekayaan intelektual di dunia perguruan tinggi.

Dalam paparannya, Kakanwil Kemenkum Kalsel memperkenalkan ORTA baru Kanwil dan menyampaikan bahwa tahun 2025 dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri. Ia juga menjelaskan kerja sama yang telah terjalin antara Kemenkumham dan UIN Antasari Banjarmasin, seperti Kesepahaman Bersama yang akan diperbarui dan Sentra KI.

Selain membahas kerja sama yang telah terjalin, Kakanwil Kemenkum Kalsel juga menyampaikan rencana kerja sama lanjutan yang lebih luas. Rencana tersebut mencakup beberapa poin penting, antara lain: Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh fakultas untuk menerapkan pencatatan Hak Cipta pada tugas akhir mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan, peningkatan pendaftaran Hak Cipta, Desain Industri, Paten, dan Kekayaan Intelektual (KI) lainnya bagi dosen, mahasiswa, serta UMKM binaan UIN Antasari Banjarmasin.

Tak hanya itu, Kakanwil juga menekankan pentingnya sosialisasi dan diseminasi KI kepada seluruh civitas akademika. Sebagai bagian dari upaya ini, Kemenkum Kalsel berencana memasukkan mata kuliah KI sebagai salah satu wujud pelaksanaan program KI Goes to Campus. Terakhir, untuk memastikan keberlanjutan program ini, Kemenkum Kalsel akan mengadakan Training of Trainers (TOT) bagi operator Sentra HKI UIN Antasari Banjarmasin.

Kadiv Yankum, Meidy menambahkan bahwa program DJKI yang berhubungan dengan Perguruan Tinggi antara lain Sentra KI, KI Goes to Campus, dan IP Academy. Ia juga menyampaikan bahwa pencatatan cipta dan paten dapat dilakukan secara tim atau lembaga. Kepala Bidang Pelayanan KI juga turut menyampaikan paparan tentang merek yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara Kemenkumham Kalsel dan UIN Antasari Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekayaan intelektual di lingkungan kampus. (Humas Kemenkum Kalsel: Arie, ed: Eko)





Perluas Kerja Sama Layanan KI, Kemenkum Kalsel Sasar Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan melalui LLDIKTI Wilayah XI



Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pendaftaran kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melakukan audiensi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan pada Kamis, (13/02/2025).

Dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti yang didampingi oleh Kadiv Yankum, Kabid Pelayanan KI, dan jajaran, disambut hangat oleh Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan, Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si.

Kakanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan bahwa tahun 2025 dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri. Ia juga menjelaskan peran Kanwil Kemenkum dalam bidang KI, seperti aspek hukum dan bisnis, serta program-program yang akan dikerjakan samakan, antara lain pembentukan Sentra KI, KI Goes to Campus, IP Academy, dan Program Unggulan Berpotensi KI (UBER KI). Kakanwil juga meminta bantuan untuk turut menyosialisasikan KI.

Kadiv Yankum, Meidy Firmansyah menambahkan bahwa program DJKI yang berhubungan dengan perguruan tinggi.

Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan, Muhammad Akbar menyambut baik inisiatif Kanwil Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan pendaftaran KI dan akan mempersiapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan.

Audiensi ini merupakan sarana untuk menyambung silaturahmi dan penguatan kerja sama antara institusi pendidikan tinggi dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KI, serta mendorong pendaftaran KI di lingkungan perguruan tinggi di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel: Arie, ed: Eko)





Cetak Pemimpin Berkompeten dan Berintegritas, Kemenkum Kalsel Ikuti Persiapan Pelatihan Future Leadership



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, mengikuti *Technical Meeting* secara virtual, Jum'at (14/02) terkait Pelatihan *Future Leadership* yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Februari 2025. Hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan pelatihan, diawali dengan arahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam arahannya, ia memaparkan gambaran umum tentang tujuan dan manfaat Pelatihan *Future Leadership* yang akan diikuti oleh seluruh Pimti Kemenkum RI.

Selain itu, Kepala BPSDM Hukum juga menjelaskan materi pelatihan, jadwal acara, serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan kegiatan.

“Pelatihan *Future Leadership* ini memiliki peran penting dalam membentuk pemimpin masa depan yang berkompeten dan berintegritas tinggi. Kami akan memastikan bahwa semua persiapan pelatihan terlaksana dengan baik dan mendukung sepenuhnya kelancaran kegiatan ini,” ungkapnya. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko)





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



**PASTI
BERGERAK**

